

ABSTRAK

Penulisan tesis yang berjudul "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dari perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui peran negara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakat sehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasi kemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridis keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut mewajibkan menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalah Apakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasi manusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasila terhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yaitu "ditetapkan dengan undang-undang" tersebut itu menjadi dasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawab untuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itu bertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dari indikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itu sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlu segera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)